

**PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN PESISIR
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

OLEH

**FRANS ROSAVELD HAMONANGAN NAINGGOLAN
NPM. 201801053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/1/23

**PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN PESISIR
DI KABUPATEN DELI SERDANG
TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**FRANS ROSAVELD HAMONANGAN NAINGGOLAN
NPM. 201801053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Di Kabupaten Deli Serdang

Nama : FRANS ROSAVELD HAMONANGAN NAINGGOLAN

NPM : 201801053

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 16 September 2022

Nama : FRANS ROSAVELD HAMONANGAN NAINGGOLAN

NPM : 201801053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris	: Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si
Pembimbing I	: Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing II	: Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu	: Dr. Isnaini, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/1/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,



Frans Rosaveld H Nainggolan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Alamsyah Hasibuan
NPM : 201801071
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten
Padang Lawas Utara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



Frans Rosaveld H Nainggolan

ABSTRAK

PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN PESISIR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Frans Rosaveld H Nainggolan
NPM : 2011801053
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono. M.SI
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kualitas sumber daya manusia nelayan yang rendah, sarana dan prasarana menangkap ikan belum memadai, harga ikan tidak stabil, pembinaan usaha belum maksimal, kurangnya modal usaha, partisipasi masyarakat yang rendah dan regulasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang serta faktor kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengacu pada teori Sondang P Siagian (2012: 142-150) yaitu Peran Pemerintah dalam pembangunan sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana sendiri. Hasil penelitian bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, tetapi belum memberikan hasil optimal. Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan antara lain kurangnya jumlah, keahlian dan kompetensi aparatur di Dinas Perikanan dalam pembinaan dan pendampingan, Rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perikanan, Kemampuan manajerial/pengelolaan kelompok yang rendah, Kesadaran dan niat berusaha masih sangat rendah serta keterbatasan anggaran. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan Dinas Perikanan perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keahlian dan kemampuan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kesempatan berusaha, Penambahan / perekrutan pegawai yang berlatar belakang pendidikan perikanan dan kelautan, meningkatkan jumlah anggaran serta Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas atau Instansi lain dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan*

ABSTRATC

THE ROLE OF FISHERY DEPARTMENT IN EMPOWERMENT OF COASTAL FISHING COMMUNITY IN KABUPATEN DELI SERDANG

Name : Frans Rosaveld H Nainggolan
NPM : 2011801053
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Budi Hartono. M.SI
Advisor II : Dr. Adam, MAP

The problem of poverty in coastal fishing communities in Deli Serdang was caused by several factors, namely the low quality of human resources, the facilities and infrastructure of inadequate was not enough, the unstable price, business development has not been maximized, lack of business capital, the participant of comunity was low and regulations. The formulation of the study was The Role of Fishery Department in Empowerment Economic of Coastal Fishing Comunity in Kabupaten Deli Serdang and the factors was faced. This research conducted qualitative research and the technique of data analysis was descriptive qualitative. The instruments used for this study were observations, interviews and documentations. The results of the study were refer to the theory of Sondang P Siagian (2012: 142-150) namely the role of the Government in development as a Stabilizer, Innovator, Modernizer, Pioneer and Implementer himself. The results of the study were fishery department of kabupaten deli serdang had been carried out the role in empowement economic of coastal fishing communities had not given optimal results. the problems faced by fishery department was lack of number, expertise and the competence of the apparatus at department in coaching and mentoring, Low of fishing participation in participating on training activities carried out by the Fishery department, Low of abilities in managerial/management abilities, Awareness and intention were very low and budget constraints. the recommendations were expected the fishery department needs to do more socialization how importance of expertise and ability to to increase the competences and business opportunities, Add/recruit employees with fisheries and marine education backgrounds, to increase the amount of budget and increase cross-sectoral collaboration with other department or agencies in business of economic empowerment of coastal fishing communities.

Key word : Role of government, Empowerment, fishing comunity

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Di Kabupaten Deli Serdang"**. Tesis ini disusun untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, 2022
Penulis


Frans Rosaveld H Nainggolan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Ir.Syarifah Alwiah, M.MA selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Zulkifli Lubis, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Bapak Said Fadli,S.Pi selaku Analis Kebijakan Dinas Perikanan Deli Serdang, serta para nelayan informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Orang tua tercinta (Alm. Nelson Nainggolan dan ibunda Rosalinawati Ginting), yang telah berjasa besar dalam perjalanan kehidupan penulis, untuk doa, semangat dan materi yang diberikan. A
9. Istri (Cory Feronica) dan anak-anak tercinta (Sandra, Pio dan Jose) atas doa, semangat dan dorongan serta pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Saudaraku Vijay khana, S.Pd. M.Hum dan rekan-rekan di BBIAT Lengau Seprang atas doa dan semangat yang diberikan
11. Para Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area , serta seluruh teman Magister Administrasi Publik yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Atas semua ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis

Frans Rosaveld H Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRATC	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Peran Pemerintah.....	8
2.1.1. Konsep Peran	8
2.1.2. Konsep Pemerintah	12
2.1.3. Peran Pemerintah	15
2.2. Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2.1. Konsep Pemberdayaan.....	22
2.2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	25
2.2.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.2.4. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	32
2.2.5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	33
2.2.6. Perekonomian Rakyat	36
2.3. Konsep Pesisir dan Masyarakat Nelayan.....	42
2.3.1. Pesisir	42
2.3.2. Pengertian Masyarakat.....	44
2.3.3. Masyarakat Nelayan	49
2.3.3.1. Nelayan	49
2.3.3.2. Masyarakat Nelayan	55
2.4. Penelitian Terdahulu	59
2.5. Kerangka Pikir Penelitian	60
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	62
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	63
3.3. Subjek / Informan Penelitian.....	63

3.4. Jenis dan Sumber Data	63
3.4.1 Data Primer	64
3.4.2 Data Sekunder	64
3.5. Teknik Pengumpulan Data	64
3.6. Teknik Analisis Data	66
3.7. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	68
3.7.1. Defenisi Konsep	68
3.7.2. Defenisi Operasional	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.....	71
4.1.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.	72
4.1.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.....	73
4.1.3. Struktur Organisasi.....	74
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Kantor.....	76
4.2. Pembahasan	92
4.2.1. Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatNelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang..	92
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang.....	128
4.2.3. Keterkaitan Penelitian Dengan Penelitian terdahulu	129
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Jumlah Nelayan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.....	4
Tabel 4.1. Daftar nama, jabatan dan pendidikan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	64



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Kerangka pikir penelitian	61
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner Penelitian
Lampiran II	Informan penelitian
Lampiran III	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan



BABI I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan memiliki paradigma berkelanjutan dalam perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap perekonomian masyarakat karena perekonomian masyarakat merupakan penopang terbesar pembangunan ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan negara tidak dapat berlangsung tanpa adanya kontribusi dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Semakin baik kemampuan ekonomi rakyat maka pendapatan pajak negara juga akan semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dari luas daratan. Luas wilayah lautan Indonesia sebesar 3.273.810 km², sedangkan luas wilayah daratan 1.919.440 km². Indonesia memiliki panjang garis pantai terbesar kedua didunia setelah Kanada, yakni sepanjang 108.000 km. Data Gasetir tahun 2020 mencatat jumlah pulau di Indonesia sebanyak 16.771 pulau. Sebagai Negara kepulauan terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati

dan non hayati sangat besar, yang bila dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga dapat menambah sumber pendapatan bagi Negara.

Tetapi kenyataannya, tingkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah pesisir yang mayoritas nelayan terutama yang jauh dari kota besar masih tergolong lemah. Sebagian besar masyarakat di daerah pesisir memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak dapat dikatakan sejahtera. Bahkan terdapat masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mampu. Dengan kondisi demikian, masyarakat akan kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Disamping itu, kebutuhan pendidikan anak juga tentu menjadi tidak terpenuhi, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup anak bangsa pada generasi yang akan datang. Artinya, kemiskinan tidak saja berdampak pada kehidupan masyarakat pada saat ini, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang.

Hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah. Pemerintah harus berperan lebih aktif memberdayakan perekonomian masyarakat, karena pemerintah memiliki fungsi pembangunan, perlindungan, dan fungsi pelayanan masyarakat. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengamanatkan daerah kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan keterampilan dan potensi suatu masyarakat sehingga dapat memaksimalkan

identitas, harkat, dan nilai-nilainya untuk bertahan dan berkembang secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan memfasilitasi proses perubahan sosial, memungkinkan kelompok-kelompok yang tidak berdaya dan terpinggirkan untuk memberikan pengaruh politik yang lebih besar di tingkat lokal, regional dan nasional. Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan menjadikan mereka lebih mandiri dan berdaya dalam segala aspek kehidupannya, yaitu dengan mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing akan berdampak baik terhadap kemandirian masyarakat suatu daerah, yang berarti mengurangi ketergantungan daerah ke pusat.

Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara dengan Wilayah terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan seluas $\pm 2.497,72$ hektar, terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Wilayah pesisir terdiri dari empat kecamatan, yaitu Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu.

Dinas Perikanan adalah instansi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menangani pembangunan terkait dengan sektor perikanan. Dinas ini memiliki peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan di sektor kelautan di wilayahnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat jumlah nelayan di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 14.481 jiwa, yang terdiri dari 12.469 nelayan menangkap ikan di Laut, dan 1.407 nelayan menangkap ikan di

perairan umum (sungai). Jumlah penduduk di 4 Kecamatan Pesisir 682.285 Jiwa. Masyarakat nelayan di wilayah pesisir terbanyak berada di kecamatan Pantai Labu berjumlah 4 587 Jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Nelayan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nelayan Laut		Nelayan Perairan Umum	Jumlah
		Waktu penuh	Sambilan		
1.	Pantai Labu	4.587	179	205	4971
2.	Percur Sei Tuan	3.498	166	425	4089
3.	Hamparan Perak	3.308	157	415	3880
4.	Labuhan Deli	1.076	103	362	1541
Jumlah Nelayan		14.481			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang,2021.

Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang telah berupaya menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan pesisir, namun upaya yang dilakukan tidak semudah yang diperkirakan, karena kenyataannya ditemui berbagai permasalahan yang dihadapi, baik dari Dinas Perikanan maupun dari nelayan pesisir. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Bapak Zulkifli Lubis,S.Pi menyatakan, bahwa dari hasil pengamatan dilapangan dan interaksi dengan nelayan dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain :

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan karena pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada pada tingkat produktivitas yang juga sangat rendah,

- b. Sarana tangkap nelayan yang belum memadai,
Nelayan masih menggunakan sarana tangkap sederhana yang belum tersentuh teknologi yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas hasil tangkapan. Dan waktu mencari ikan juga akan dipengaruhi oleh cuaca dan musim.
- c. Harga ikan yang tidak stabil,
Banyak nelayan yang bekerja sebagai buruh tidak memiliki sarana untuk menangkap ikan, sehingga mereka harus menjual hasil tangkapannya dengan harga murah ke Toke.
- d. Pembinaan usaha nelayan belum maksimal,
Pembinaan pada usaha nelayan masih kurang, baik dalam hal pemasaran yang berkaitan erat dengan produksi, efisiensi, harga dan pendapatan, maupun pada pengolahan hasil tangkapan yang dapat menambah nilai produksi nelayan.
- e. Modal kerja yang terbatas,
Keterbatasan modal dalam memenuhi perlengkapan sarana menangkap ikan yang memadai seperti sampan dan alat tangkap, sehingga nelayan menggunakan peralatan seadanya.
- f. Peraturan yang mengatur pemanfaatan wilayah pesisir belum dimiliki oleh daerah.

Kondisi masyarakat seperti ini menyebabkan lambatnya perkembangan atau kemajuan daerah pesisir Deli Serdang. Semua pihak terkait (Dinas / badan perangkat daerah) yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terutama Dinas Perikanan, harus berupaya dan memberikan peran dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat. Agar peneliti dapat

mengetahui secara mendalam maka perlu dilakukan penelitian. Judul penelitian ini adalah ” **PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN PESISIR DI KABUPATEN DELI SERDANG**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor kendala Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun menganalisis secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah

2.1.1. Konsep Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam bukunya Sarwono (2011:224), peran adalah seperangkat formulasi yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu. Peran memiliki empat istilah, yakni :

- a. Harapan tentang Peran adalah asumsi bagi orang lain secara keseluruhan tentang cara berperilaku yang benar, yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang memainkan peran tertentu.
- b. Norma
Orang sering mengacaukan ungkapan "harapan" dengan "norma". Bagaimanapun, menurut Secord dan Backman (1964) "norma" hanyalah satu jenis "harapan".
- c. Wujud perilaku

Variasi dalam teori peran ini dianggap normal dan tidak memiliki batas. Sama halnya dengan teater di mana tidak ada aktor yang identik secara sempurna dalam peran tertentu. Bahkan aktor dapat memainkan peran tertentu dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, teori peran cenderung mengelompokkan istilah-istilahnya bukan menurut tindakan tertentu, tetapi menurut klasifikasi menurut asal tindakan dan sifat tujuannya

(atau motifnya). Misalnya, bentuk-bentuk perilaku peran dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti prestasi kerja, prestasi sekolah, prestasi olahraga, disiplin anak, mencari nafkah, dan menjaga ketertiban.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi sangat sulit dipisahkan dari makna ketika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan keduanya didasarkan pada ekspektasi normatif masyarakat. Orang menggunakan norma untuk menyampaikan kesan positif atau negatif dari perilaku. Kesan negatif atau positif ini disebut penilaian peran. Sanksi di sisi lain merujuk pada upaya orang untuk mengubah apa yang sebelumnya dianggap negatif menjadi positif dengan mempertahankan nilai-nilai positif atau mengubah karakteristik peran.

Berdasarkan paparan Biddle dan Thomas di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan lebih berpusat di sekitar cara berperilaku dan hubungan individu dalam aktivitas publik di mana kepemilikan pekerjaan tergantung pada tingkat yang lebih besar terhadap situasi individu dalam aktivitas publiknya. Iklim dan perilaku yang ditampilkan selama waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Riyadi (2002:138) menyatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan masyarakat atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan secara terstruktur, baik norma-norma, harapan, tabu, tanggung

jawab dan lainnya. Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan perangkat perilaku dalam kelompok, baik kecil maupun besar, yang menjalankan berbagai peran. Peran dapat dirumuskan juga sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Bagaimana suatu peran dijalankan dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama

Menurut Poerwadarminta, (Cahaya, 2017:22) peran dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dalam suatu keadaan atau kesempatan tertentu, dimana cara bertingkah laku yang diselesaikan merupakan suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berdomisili atau memiliki situasi tertentu atas permintaan publik.

Pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dibagi menjadi :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya di dalam kelompok.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompok, memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah kontribusi pasif oleh anggota kelompok, yang menahan diri dari memberikan fungsi lain dalam kelompok kesempatan untuk berhasil.

Menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis status atau kedudukan, menyiratkan kinerja peran ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran itu. Perbedaan posisi dan peran saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain.

Sutarto (2009:138-139) merekomendasikan peran menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Konsep peran, yakni keyakinan individu tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain tentang bagaimana seseorang dalam posisi tertentu harus berperilaku.
- c. Implementasi peran, yaitu perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu

Ketika ketiga unsur tersebut selaras, maka interaksi sosial akan berkelanjutan dan lancar. Berdasarkan pendapat ini, peran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari individu dalam hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang terkait dengan posisi atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran muncul ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.
- d. Ada tindakan dan peran yang terjadi ketika diberi kesempatan..

. Peran adalah tindakan yang memaksa individu atau organisasi untuk melakukan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan tujuan dan kondisi yang disepakati secara umum.

2.1.2. Konsep Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan dicirikan sebagai suatu proses untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau suatu tata cara untuk menyelesaikan perintah, yang mengawasi yang memerintah.

Max Weber (dalam Dahl, 1994) mencirikan pemerintah sebagai apapun yang berlaku sehubungan dengan mendukung klaim bahwa dia memiliki hak selektif untuk menggunakan kekuasaan yang sebenarnya untuk melaksanakan pedomannya dalam batas wilayah tertentu.

Soewargono, 1979 dalam (Sumaryadi, 2010:20), mengartikan otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan politik, yang sering disebut sebagai penguasa sebagai kepala pemerintahan umum.

Surbakti (1992:167) mengartikan bahwa administrasi (pemerintahan) secara etimologis berasal dari kata Yunani; *Kubernan* atau nahkoda kapal, yang berarti melihat ke depan, memutuskan berbagai strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan Negara - masyarakat, memperkirakan arah kemajuan negara-masyarakat di kemudian hari dan bersiap-siap bergerak untuk memenuhi perbaikan masyarakat sebagai serta mengawasi dan membimbing daerah setempat menuju tujuan yang ideal. Dengan cara ini, kegiatan pemerintah lebih kearah pada

penentuan dan menjalankan pilihan politik untuk mencapai tujuan negara bagian lokal.

Ndraha (2003) mencirikan pemerintah sebagai organisasi yang memproses kepuasan kebutuhan manusia sebagai pengguna produk pemerintah dalam administrasi umum dan sipil. Pemerintah (*government*) terbentuk dari pendelegasian kekuasaan rakyat. Sementara pemerintahan (*governance*) mengacu pada kapasitas dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, mengacu pada metode manajemen. Governance pada tingkat yang lebih besar merupakan kekhasan sosial, dan lebih luas daripada pemerintah (*government*). Pemerintah membutuhkan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sementara government menunjuk pada organ. Gagasan tentang government mengacu pada organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (pemerintah dan negara). Gagasan governance tidak hanya mencakup otoritas pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat dan cakupannya lebih luas.

Jum anggraini (2012:14) menyatakan bahwan pemerintah berasal dari kata Yunani *-eratein*". Dalam bahasa Inggris, istilah pemerintah disebut dengan Government, yang berasal dari bahasa Latin *-Gubernaculun*" yang berarti membimbing. *Gubernaculun* di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Secara etimologi, pemerintah berasal dari kata dasar *-perintah*" yang berarti menyuruh untuk melakukan sesuatu sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintah dari perspektif yang luas adalah kemampuan yang mencakup

tindakan, perbuatan dan keputusan oleh perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah organ/badan/perangkat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara kolektif memikul tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan tujuan mempercepat terwujudnya kepentingan bersama melalui perbaikan, pelayanan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan ciri khas daerah dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama. Peran pemerintah daerah adalah dalam kegiatan pengelolaan, memberikan informasi, pengetahuan dan edukasi tentang pengelolaan usaha perikanan. Kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat mendorong modal sosial nelayan dan memungkinkan mereka memiliki kekuatan sosial yang lebih besar dalam ekonomi mandiri mereka. Pembinaan dan

pendidikan adalah peran kunci bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Namun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah poin (Y) pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan pada Sub Urusan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis yang berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan

publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan, dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah, 2004: 8). Dalam pengertian ini, pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisor, yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak saat stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisor, pemerintah berperan

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi

Ndraha (1987:110) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan operasional hingga ideologis dan spiritual, peran pemerintah yang otoritatif dan kemampuan pemimpin untuk melaksanakannya sangat menentukan. Karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000:48) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik senantiasa didasarkan pada usaha-usaha pokok dan kemampuan-kemampuan yang dikelola dengan pedoman-pedoman yang direkomendasikan dan pelaksanaan tugas dan kemampuan dasar itu bergantung pada pemimpin itu sendiri. Dalam hal

ini, kegiatan yang harus dilakukan/diselesaikan memiliki tiga kemampuan mendasar, tepatnya: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa pelayanan yang baik akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Tugas pemerintah daerah dalam peningkatan daerah adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kekuatan vital dan kedudukan penting, hal ini berkaitan dengan kemampuannya sebagai bantuan masyarakat untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah, keamanan, pemerataan, keberhasilan dan kerukunan bagi daerah (Hayat dkk., 2018)

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah menurut (Arsyad Lincolin ,2000)) adalah :

1. Pelaku usaha (*Entrepreneur*), yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.
2. Koordinator, yang mengatur regulasi dan mengusulkan strategi dalam pembangunan.
3. Fasilitator sarana dan prasarana.
4. Stimulator, penggerak dalam peningkatan usaha melalui tindakan.

Davey (2011:21) menyatakan bahwa ada lima fungsi utama pemerintahan, yaitu :

1. Fungsi penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
3. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut Siagian (2012: 128), fungsi utama pemerintahan negara adalah pengaturan dan pelayanan. Fungsi regulasi biasanya dikaitkan dengan karakter negara modern sebagai negara hukum, dan fungsi pelayanan dengan karakter negara sebagai negara kesejahteraan. Di sini jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, dengan tujuan menegakkan hukum dan membawa kemakmuran bagi warganya.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional digambarkan lebih jelas dan rinci oleh Siagian (2012:142-150). Bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditekankan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri .

- a. Stabilisator, kiprah pemerintah merupakan mewujudkan perubahan tanpa berubah sebagai suatu gejolak sosial, yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan nasional dan kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut bisa terwujud dengan cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses pengenalan yang elegan namun efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang sedikit demi sedikit namun berkesinambungan
- b. Inovator, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, seluruh pemerintah harus menjadi sumber inovasi. Oleh karena itu, kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat menjalankan perannya secara efektif memerlukan tingkat legitimasi yang tinggi. Misalnya, pemerintah yang "memenangkan" perebutan kekuasaan atau memenangkan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil dengan sedikit legitimasi akan kesulitan untuk membawa inovasinya ke publik. Tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah penerapan inovasi pertama yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin berubah menjadi negara yang kuat, mandiri dan diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sistem pendidikan nasional yang tangguh, yang membentuk masyarakat yang

produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan yang diinginkan sebagai orientasi.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah wajib sebagai panutan (*role model*) bagi semua rakyat. Pelopor pada bentuk hal-hal positif misalnya kepeloporan pada bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan pada penegakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan pada kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan pada berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun jelas pelaksanaan pembangunan adalah tanggung jawab nasional, bukan sebagai beban pemerintah semata, dengan beberapa pertimbangan misalnya keselamatan negara, kapital terbatas, kemampuan yang belum memadai, tidak diminati rakyat dan secara konstitusional adalah tugas pemerintah, sangat mungkin masih banyak aktivitas yang tidak dapat diserahkan pada pihak swasta tetapi wajib dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan contoh mentalitas, nilai-nilai dan tujuan yang diharapkan dari seorang individu berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sedangkan posisi adalah status atau tempat individu dalam kerangka sosial dan merupakan tanda dan realisasi diri. Peran dicirikan juga sebagai perkembangan perilaku yang diharapkan oleh iklim sosial terkait dengan pekerjaan orang-orang dalam pertemuan yang berbeda.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1. Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam kaitannya dengan perbaikan dan penanggulangan kemiskinan. Mengingat istilah tersebut merujuk pada kegagalan masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan tanpa adanya mediasi dari pemerintah. Mitigasi kemiskinan membutuhkan rencana yang jelas yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan "kekuatan" bukan "kekuasaan" dari pemberdayaan itu sendiri. Mungkin istilah yang paling tepat adalah dengan memberi energi agar individu yang bersangkutan dapat bergerak dengan mandiri (Sulistiyani, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79).

Rappaport (dalam Suharto, 2009 : 59) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan cara di mana masyarakat, organisasi, dan komunitas dikoordinasikan agar memiliki pilihan untuk mengendalikan atau memiliki kendali atas kehidupan mereka.

Sumodiningrat (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013 : 29) menyatakan bahwa intisari pemberdayaan adalah terpaku pada manusia dan kemanusiaan, dimana manusia dan kemanusiaan adalah sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial.

Mubyarto (dalam Mardikanto & Soebiato, 2013: 47) menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

World Bank (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013: 27) mencirikan pemberdayaan sebagai sebuah karya untuk membuka pintu dan kapasitas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani berbicara atau menyuarakan pendapat, pemikiran, gagasan mereka, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (memutuskan) sesuatu (konsep, teknik, produk, tindakan, dan lain lain) yang terbaik bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses perluasan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Suharto (2011: 59), pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai suatu siklus, pemberdayaan merupakan usaha memberi kekuatan untuk mempertegas keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang mengalami kemelaratan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang akan dicapai oleh perubahan sosial, khususnya individu yang terlibat, memiliki kekuatan atau memiliki informasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka, seperti memiliki keberanian, memiliki pilihan untuk menyampaikan tujuan, memiliki pekerjaan, ikut serta dalam aktivitas kemasyarakatan, dan bebas dalam menyelesaikan tugas hidup mereka. Makna pemberdayaan sebagai tujuan sering kali dimanfaatkan sebagai tanda penguatan yang efektif. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif melalui kelompok.

Zubaedi (2013:162), gagasan pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya untuk memperkuat modal sosial yang dimiliki oleh sebuah kelompok

masyarakat. Ide pemberdayaan pada dasarnya adalah pengalihan kekuatan melalui penguatan modal sosial dalam kelompok masyarakat, agar lebih bermanfaat dan menjauhi kecenderungan hal kurang bermanfaat. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki gagasan peningkatan perekonomian yang mengandung nilai-nilai sosial. Ide tersebut mencerminkan metode perbaikan yang berfokus pada individu (*people centered*), *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pentingnya gagasan individu (*people centered*) adalah menitikberatkan pembangunan pada masyarakat. Ide *participatory* menyiratkan pembangunan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat. *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Ambar Teguh (Azhim, Afifuddin dan Hayat, 2019:13) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai interaksi menuju berdaya, atau suatu proses pemberian kekuasaan/kekuatan/kapasitas dari pihak yang memiliki daya kepada masyarakat yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan adalah cara agar individu, jaringan, dan asosiasi diarahkan untuk memiliki pilihan dalam mengendalikan atau memiliki kendali atas kehidupan mereka.

Ide pemberdayaan tercipta dari fakta individu atau kelompok yang lemah atau tidak berdaya baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, jaringan, semangat, kerja keras, ketekunan, dan hal lainnya.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk mendapatkan atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan

kepada masyarakat yang lemah untuk mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pembinaan otonomi daerah dan bantuan pemerintah dengan memperluas informasi, mental, kemampuan, tingkah laku, kapasitas, kewaspadaan, serta pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tidak cukup untuk meningkatkan efisiensi, memberikan peluang usaha yang setara atau modal, namun juga harus diikuti oleh perubahan konstruksi keuangan daerah, mendukung kemajuan masyarakat melalui perluasan peran, produktivitas dan efisiensi.

Kartasmita (2012:45) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan gagasan pembangunan ekonomi yang mencerminkan nilai sosial. Gagasan ini mencerminkan pandangan dunia baru tentang kemajuan, yaitu "berfokus pada individu, partisipatif, memungkinkan, dan masuk akal". Ide ini lebih luas dari sekedar mengumpulkan kebutuhan pokok atau memberikan komponen untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (jaring keamanan),

yang akhir-akhir ini diciptakan sebagai upaya untuk menelusuri pilihan-pilihan yang berbeda dengan ide-ide pembangunan sebelumnya.

Eko Sudarmanto dkk (2020:21) menyatakan bahwa pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah sebuah karya untuk membangun martabat terhadap kelompok masyarakat tertentu yang berada dalam kondisi serba kekurangan dan keterbelakangan. Upaya ini direncanakan untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran mereka, serta mengembangkan kapasitas mereka yang sebenarnya.

Jim Ife (1997) mengartikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat untuk membangun kapasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan ikut serta dalam upaya untuk mempengaruhi keberadaan perkumpulan mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Jim Ife, gagasan pemberdayaan memiliki hubungan yang nyaman dengan dua gagasan pokok, yaitu: gagasan kekuatan (*power*) dan gagasan ketimpangan (*disadvantaged*). Dengan demikian, gagasan pemberdayaan dapat dimaknai melalui 4 sudut pandang, yaitu : Pluralis, Elitis, Strukturalis, dan Post-strukturalis.

Zubaedi (2013: 21-22), memaknai 4 sudut pandang tersebut sebagai berikut. Pertama, pandangan pluralis menganggap pemberdayaan sebagai siklus untuk membantu orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka dapat bersaing lebih efektif. Dalam pandangan pluralis, pemberdayaan dilakukan dengan membantu masyarakat melalui penyuluhan tentang bagaimana memanfaatkan kemampuan untuk melobi, memanfaatkan media yang

berhubungan dengan aktivitas politik dan memahami bagaimana kerangka itu berfungsi. Dengan demikian, pemberdayaan dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat bersaing secara layak dengan tujuan tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, sudut pandang elitis melihat pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, penguasa, orang kaya, dengan membentuk koalisi dengan mereka, atau dengan konfrontasi dan mencari perubahan di kalangan elit. Hal ini dilakukan karena ketidakberdayaan masyarakat disebabkan adanya *power* dan kontrol yang kuat para elit.

Ketiga, sudut pandang strukturalis melihat pemberdayaan sebagai rencana perjuangan yang sangat sulit dengan alasan bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan ketimpangan struktural. Dengan demikian, pemberdayaan wilayah masyarakat adalah jalan kebebasan yang harus diikuti perubahan-perubahan struktural yang fundamental dan lenyapnya penindasan struktural.

Keempat, sudut pandang post-strukturalis melihat pemberdayaan sebagai sebuah karya untuk mengubah sistem yang menggarisbawahi perspektif keilmuan ketimbang aksi atau praksis. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok masyarakat dipandang sebagai tahap untuk menumbuhkan pemahaman peningkatan penalaran baru dan logis, dengan menjadikan pendidikan sebagai fokus pemberdayaan masyarakat.

Jim Ife juga membedakan 6 jenis kualitas lokal yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan. Enam kualitas tersebut adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kapasitas untuk memutuskan kebutuhan mereka sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses terhadap sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Menurut Sumaryadi (2005:111) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menata masyarakat bersamaan dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan kelompok masyarakat menurut Sumaryadi (2005:115) pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat yang lemah, tak berdaya, miskin, seperti petani kecil, buruh tani, komunitas miskin perkotaan, masyarakat adat yang belum maju, kaum muda pencari kerja, orang cacat dan kaum wanita yang terpinggirkan.
2. Memberdayakan kelompok masyarakat ini dalam hal sosial ekonomi agar mereka menjadi mandiri yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun juga dapat mengambil bagian dalam pengembangan masyarakat

Widjaja (2013:169) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah cara membangun kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga mereka dapat memiliki karakter, harga diri dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan

meningkatkan diri secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, dan ekonomi, agama dan bidang sosial.

Menurut Sumodiningrat (2013:32), pemberdayaan masyarakat adalah upaya menata masyarakat melalui perwujudan terhadap potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Pemberdayaan masyarakat mencakup dua bagian yang saling terkait, yakni masyarakat yang menjadi pihak diberdayakan dan pihak yang peduli yang menjadi pihak pemberdaya.

Dengan membedakan variabel kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang menyebabkan mereka terbelakang, ada tiga sistem pemberdayaan yang seharusnya dilakukan, yaitu:

1. Pemberdayaan melalui penataan dan pendekatan yang dilakukan dengan membangun atau mengubah desain dan lembaga yang dapat menyediakan akses yang sama kepada sumber daya, pelayanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat.
2. Pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan sosial dan politik dalam rangka membentuk kekuasaan yang efektif.
3. Pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran yang dilaksanakan melalui pendidikan di berbagai aspek. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keahlian, serta meningkatkan kekuatan masyarakat lapis bawah.

Menurut Hikmat (2004), pemberdayaan masyarakat tidak hanya harus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mampu

meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta menjaga tatanan nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri. Gerakan pemberdayaan dalam pembangunan berasal dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pemberdayaan adalah cara memaksimalkan segala potensi ide dan kemauan untuk keluar dari kemiskinan yang melanda masyarakat dan beberapa kelompok masyarakat. Inovasi kreatif lingkungan merupakan landasan untuk menginisiasi penentuan nasib sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya sadar, ekonomi, dan politik untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan memanfaatkan potensi sumber dayanya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik di tingkat daerah, dalam bentuk legal deliverables seperti peraturan daerah atau provinsi dan peraturan pemberdayaan nelayan lainnya, untuk mencapai tujuan utama yaitu melindungi dan memberdayakan nelayan

2.2.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Setiap inisiatif atau program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan jelas, baik tujuan dan manfaat, serta rumusan program itu sendiri. Kemiskinan tercermin dalam indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak memadai. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Keterbelakangan misalnya tingkat produktivitas rendah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Melemahnya pasar tradisional karena sumber daya lokal digunakan untuk memenuhi kebutuhan

perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah keterbelakangan bersifat struktural (politik) dan kultural.

Sulistiyani (2012:45) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk kemandirian. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan tindakan seseorang. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami dalam suatu masyarakat yang ditandai dengan kapasitasnya untuk berpikir, memutuskan, dan melakukan apa yang dianggapnya tepat untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan kemampuan sendiri. Kapasitas yang dimaksud adalah *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik*, dan *afektif* serta berbagai aset yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus memiliki kemampuan berperan untuk bertindak sebagai sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan perlu mengembangkan keahlian dalam perencanaan pemberdayaan.

Kondisi kognitif pada dasarnya adalah kemampuan masyarakat untuk berpikir berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Keadaan konatif adalah sikap perilaku masyarakat yang dididik dan diselaraskan terhadap perilaku yang peka terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi Afektif adalah emosi yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat mengintervensi untuk mencapai penguatan sikap dan perilaku. Keterampilan psikomotorik adalah keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan pembangunan.

2.2.4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Setiap kegiatan selalu identik dengan proses. Proses merupakan bagian terpenting, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Menurut Suharto (2011: 59), pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu siklus, pemberdayaan adalah suatu gerak maju dari usaha untuk memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok masyarakat lemah, khususnya orang-orang yang mengalami kemelaratan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang perlu dicapai oleh perubahan sosial, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi dan sosial mereka, misalnya memiliki keyakinan diri, memiliki pilihan untuk menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mengambil bagian dalam kehidupan sosial, terlebih lagi bebas dalam menyelesaikan tugas hidup.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif/kelompok. Proses ini merupakan hubungan antar kelas sosial yang dicirikan oleh polarisasi ekonomi, di mana kemampuan individu yang 'sepikiran' untuk bersatu dalam kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan paling efektif. Atau merupakan bentuk perubahan sosial yang melibatkan hubungan. Hal ini dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi dalam setiap kelompok. Artinya, individu dalam kelompok belajar menggambarkan situasi dan mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Belajar mendefinisikan, menganalisis, dan menemukan solusi.

Kartasmita (2012:23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan harus dimungkinkan melalui tiga proses, yakni :

1. Membangun suasana atau lingkungan yang memungkinkan kemampuan masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Tahap awal adalah bahwa setiap orang memiliki potensi yang dapat berkembang. Maksudnya agar tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat yang rentan. Dalam situasi yang unik ini, pemberdayaan adalah membangun kekuatan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. Mengembangkan potensi masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah lebih positif selain iklim / suasana.
3. Memberdayakan berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dijaga agar tidak menjadi lebih rentan, karena tidak adanya kekuatan dalam menghadapi yang kuat.

2.2.5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2012:179). Tetapi siklus tersebut akan dilepaskan setelah tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai.

Sumodiningrat (2013:41) berpendapat bahwa pemberdayaan tidak bersifat permanen dan akan terus berlanjut sampai masyarakat sasaran menjadi mandiri.

Dari perspektif ini, itu berarti pemberdayaan melalui masa belajar menuju kemandirian.

Program pemerintah, baik inovasi maupun teknologi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula hasil inovasi dalam dunia usaha bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Padahal, hasil inovasi tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan budaya masyarakat. Keragaman masyarakat begitu beragam sehingga sulit untuk percaya bahwa inovasi akan diterima atau tidak oleh masyarakat yang beragam ini. Dengan kata lain, program *top-down* harus diselaraskan dengan kemungkinan dan kebutuhan masyarakat (*bottom top*).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan pada Pasal 112 ayat (3) : –Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memberdayakan masyarakat desa”. Pada ayat (4) : –Pemberdayaan masyarakatd desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”.

Menurut Sulistiyani (2012:83-84), proses pembelajaran dalam konteks pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju tindakan sadar dan peduli, sehingga seseorang merasa perlu untuk mengembangkan kapasitasnya.

2. Tahap Transformasi Keterampilan berupa pemberian wawasan pengetahuan, kompetensi keterampilan untuk membuka wawasan, dan keterampilan dasar agar dapat berperan dalam pembangunan.
3. Tahap yang meningkatkan kemampuan intelektual dan kemampuan teknis, membentuk kemandirian dan kemampuan, serta mengarah pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2010:3), ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menekankan proses dan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Penyadaran ; Pada tahap ini masyarakat disosialisasikan untuk memahami bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan dilakukan secara mandiri (swadaya).
2. Pengkapasitasan ; Sebelum suatu komunitas dapat diberdayakan, harus diberikan keterampilan untuk mengelolanya. Fase ini sering disebut dengan *capacity building*, yang terdiri dari kapasitas, organisasi, dan sistem nilai.
3. Pendayaan ; dalam fase ini target memperoleh kekuatan, kekuatan dan peluang tergantung pada keterampilan yang diperoleh.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari keberdayaan ekonomi mereka, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan empat dimensi kekuasaan: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuatan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Masyarakat dikatakan berdaya bila dapat berperan signifikan dalam memecahkan masalah dan

memenuhi kebutuhan. Orang yang bergantung pada orang lain untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka adalah masyarakat tidak berdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan harus didefinisikan sebagai aktor utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

2.2.6. Perekonomian Rakyat

Pembenahan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghubungkan antara negara dan modal dalam perkembangan teknokrasi, tetapi juga menempatkan individu dalam asosiasi yang dinamis selama proses pembangunan desa. Masyarakat sebagai subjek pembangunan, dan bukan hanya sebagai objek pembangunan. Negara memposisikan kembali perannya regulator dan fasilitator pembangunan dan kapitalisasi pembangunan sebagai instrumen dan sarana untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Pengertian ekonomi kerakyatan adalah segala kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga merupakan salah satu bentuk potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi dibentuk sebagai kebalikan langsung dari model pembangunan industrialisasi yang tidak berpihak pada sebagian besar masyarakat.

Ide ini dibentuk dari beberapa kerangka logis, yaitu :

1. Proses pemusatan kekuasaan dihasilkan dari pemusatan kendali atas faktor-faktor produksi.

2. Pemusatan kekuasaan pada faktor-faktor produksi akan menciptakan masyarakat buruh dan masyarakat pengusaha marginal.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
4. Penerapan sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis menciptakan dua kelompok masyarakat yakni masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Yang akhirnya terjadi adalah dikotomi yakni masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi mendominasi dan didominasi, pembebasan harus datang melalui proses pemberdayaan didominasi.

Tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lemah. Pendapatan masyarakat umumnya berasal dari upah / gaji dan keuntungan usaha. Kebanyakan masyarakat yang tingkat perekonomiannya lemah hanya menerima gaji atau upah yang rendah, karena keterbatasan keterampilan mereka.

Dibutuhkan pola pemberdayaan yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Bentuk pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang mereka tetapkan. Beberapa program kegiatan yang dapat diberikan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil antara lain :

1. Bantuan Modal.

Permodalan adalah merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu. Lambatnya penghimpunan modal di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu penyebab lambatnya kemajuan usaha dan rendahnya surplus usaha di bidang usaha kecil, kecil, dan menengah. Upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dari segi permodalan adalah bagaimana bantuan permodalan yang diberikan tidak membuat ketergantungan masyarakat. Solusi yang ingin dicapai dari segi permodalan ini adalah menciptakan sistem yang kondusif bagi unit usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan akses ke lembaga-lembaga keuangan.

2. Pembangunan Prasarana

Upaya untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan usaha akan sia-sia bila masyarakat tidak dapat menjual produk mereka atau hanya dapat menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur produksi dan pemasaran menjadi bagian penting dalam penguatan masyarakat di bidang ekonomi. Ketersediaan prasarana perdagangan dan/atau transportasi dari tempat produksi ke pasar memperpendek rantai perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan bagi pengusaha kecil dan menengah. Dengan kata lain, dari sisi pemberdayaan ekonomi, proyek pembangunan infrastruktur yang mendukung desa tertinggal benar-benar strategis.

3. Pendampingan.

Bantuan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu tentu sangat diperlukan dan penting. Peran utama dari pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran atau refleksi dan bertindak sebagai perantara untuk memperkuat kemitraan antara usaha kecil menengah dan perusahaan besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lemah pada awalnya dilaksanakan melalui pendekatan individual namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih haruslah pendekatan kelompok. Pasalnya, akumulasi modal di kalangan masyarakat miskin akan sulit dicapai dan harus dilakukan secara kolektif dalam kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dalam masalah distribusi, tidak mungkin masyarakat miskin dapat mengontrol secara mandiri distribusi output produktif dan input produktif. Melalui kelompok, masyarakat dapat membangun kekuatan untuk membantu membuat keputusan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, usaha besar berkembang akan dapat berkembang bila ada usaha kecil dan menengah. Begitu juga sebaliknya, usaha kecil akan dapat tumbuh dan berkembang bila ada usaha besar dan menengah. Daya saing yang tinggi akan tumbuh ketika perusahaan besar, menengah dan kecil saling terhubung. Efisiensi hanya dapat ditingkatkan melalui integrasi produksi yang merata.

Dengan demikian, masing-masing pihak diberdayakan melalui kemitraan permodalan, kemitraan proses produksi, dan kemitraan distribusi.

Sumodiningrat (2013:42) juga menyatakan bahwa ada 4 (empat) gagasan dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu :

1. Perekonomian nasional adalah perekonomian yang dijalankan oleh rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat luas untuk menjalankan ekonominya sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah upaya mewujudkan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing dalam mekanisme pasar yang sesuai. Karena hambatan pembangunan ekonomi rakyat merupakan hambatan struktural, maka penguatan ekonomi nasional harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang menyertainya adalah dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah dalam proses transformasi struktural adalah: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; penguatan kelembagaan; penguasaan teknologi; dan penguatan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan peluang usaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, namun harus menjamin partisipasi dan kemitraan yang erat antara pihak yang telah maju dengan pihak yang masih lemah dan belum berkembang.

Kebijakan dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah :

- a. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar pada aset produksi, khususnya hal permodalan ;
- b. meningkatkan nilai jual dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar tidak hanya sekedar sebagai price taker yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar;
- c. penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan ;
- d. memperkuat usaha-usaha kecil;
- e. mendorong munculnya wirausaha baru; dan
- f. pemerataan spasial.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a. memperluas penerimaan bantuan modal usaha;
- b. peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari uraian-uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terjadi secara individu perlu didukung oleh pemerintah setempat baik secara kebijakan maupun dukungan bantuan untuk memudahkan pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, bentuk dukungan Pemerintah lainnya bisa dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat miskin tentang pengembangan usaha melalui bantuan kredit atau bentuk pendampingan dalam peningkatan keterampilan masyarakat.

2.3 Konsep Pesisir dan Masyarakat Nelayan

2.3.1 Pesisir

Ketchum (1972) menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencirikan daerah tepi pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam situasi khusus ini, luas pedoman Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup wilayah peralihan antara lingkungan darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut, ke arah darat meliputi wilayah organisasi sub-lokal dan ke arah laut sejauh yang 12 (dua belas) mil sesuai dengan lingkup suatu negara.

GESAMP1 (2001) mencirikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari darat, dan dicirikan secara luas untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam. Jadi garis besar wilayah pesisir ini bisa berbeda tergantung pada aspek administratif, ekologis, dan perencanaan.

Kodoatie dan Sjarief (2010:319) berpendapat bahwa wilayah pesisir adalah wilayah di tepi laut antara pasang surut terendah dan tertinggi, terdiri dari daratan dan badan air, yang masih dipengaruhi oleh aktivitas di darat dan laut. Sehingga kedua wilayah ini masih saling terkait.

Budiharsono (2009:21) menyatakan bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan belakang dan kawasan perkotaan sebagai pusatnya. Wilayah pesisir merupakan daerah produksi ikan, namun dapat dikatakan pendapatan penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Wilayah pesisir memiliki arti penting karena merupakan titik koneksi antara sistem biologis darat dan laut, dan memiliki potensi yang sangat kaya untuk sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (Clark, 1996). Kelimpahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk mengembangkannya dan mendesak instansi-instansi terkait untuk membuat regulasi pemanfaatannya.

Ada tiga habitat utama (esensial) di kawasan pesisir, yaitu hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang tertentu. Terdapat hubungan dan kolaborasi yang saling mempengaruhi antara ketiga lingkungan tersebut. Pengelolaan satu lingkungan harus memikirkan pengelolaan lingkungan alam yang lain, karena kerusakan yang terjadi di satu kawasan mempengaruhi keberadaan biota di habitat yang berbeda.

Sebagai daerah peralihan darat-laut dengan keunikan ekosistem dan sumber daya alam yang melimpah, wilayah pesisir sangat menarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Aktivitas manusia dalam

pemanfaatan sumber daya alam cenderung berlebihan dan cenderung merusak ekosistem yang ada, sehingga mengakibatkan degradasi yang semakin meningkat, kualitas fungsi ekosistem pesisir, dan pada akhirnya juga merugikan masyarakat. Pantai juga merupakan tempat yang mencegah gelombang laut besar masuk ke daratan, dan terdapat hutan bakau.

Dari berbagai gambaran pengertian wilayah pesisir di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen utama wilayah pesisir adalah:

1. Pertemuan antara darat dan air/laut.
2. Keterlibatan berbagai ekosistem berbeda.
3. Adanya hubungan dan keterkaitan antara sistem ekosistem yang berbeda.
4. Adanya pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut.
5. Ada batasan-batasan (*boundary*).

2.3.2. Pengertian Masyarakat

Ungkapan "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata "*syarakah*" yang artinya berpartisipasi, ambil bagian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ungkapan "masyarakat" disebut "*society*" yang berasal dari kata latin "*socius*" yang artinya kawan.

Koentjaraningrat (2002:150) mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang "bertemu" atau, dalam istilah ilmiah saling "berinteraksi". Entitas manusia dapat memiliki prasarana yang memungkinkan warga untuk berinteraksi satu sama lain.

Gunsu Nurmansyah dkk (2019: 46), pengertian masyarakat adalah berbagai individu yang menjadi suatu perkumpulan yang disatukan dan memiliki hubungan yang sangat langgeng dan memiliki kesamaan kepentingan. Demikian pula, masyarakat dapat diartikan sebagai salah satu unit sosial dalam kerangka sosial, atau solidaritas keberadaan manusia.

Beberapa pengertian masyarakat menurut ahli antropologi dan humanisme dalam Gunsu Nurmansyah dkk (2019: 46-45), adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan sosial Indonesia Selo Sumarjan, pengertian masyarakat adalah individu-individu yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Menurut antropolog Indonesia Koentjaraningrat, gagasan masyarakat adalah solidaritas keberadaan manusia yang bekerja sama yang diatur oleh sistem adat tertentu secara kuntinue dan diikat oleh kesamaan identitas.
- c. Menurut antropolog Amerika Ralph Linton, masyarakat adalah sekelompok orang yang dapat hidup bersama untuk jangka waktu yang lebih lama, bekerja sama, mengatur kehidupan mereka bersama, dan memandang kelompok sebagai unit sosial.
- d. Menurut Karl Marx, sosiolog modern paling berpengaruh, masyarakat adalah struktur yang tunduk pada ketegangan organisasi atau perkembangan karena konflik antara kelompok dengan kepentingan ekonomi yang berbeda.
- e. Menurut Emile Durkheim, salah satu pendiri sosiologi modern, definisi masyarakat adalah realitas objektif para anggotanya.

- f. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, juga seorang sosiolog, mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, tinggal di daerah tertentu, berbagi budaya yang sama, dan terlibat dalam sebagian besar kegiatan kelompok.
- g. Menurut Dannerius Sinaga, konsep masyarakat berarti orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menempati suatu wilayah dan terhubung untuk memenuhi kebutuhannya.
- h. Phil Astrid S. Susanto mengatakan bahwa masyarakat atau masyarakat adalah pribadi sebagai suatu kesatuan sosial dan suatu tatanan yang dapat dijumpai berulang-ulang.

Jenis – jenis masyarakat:

1. Masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak terikat oleh adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dipandang sebagai penghalang kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional untuk membawa kemajuan.
2. Masyarakat Adat, masyarakat yang masih terikat oleh adat dan adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional tidak tunduk pada perubahan dari luar lingkungan sosialnya.

Salah satu yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam.

Kesatuan hidup manusia dalam kerangka desa, kota dan bangsa merupakan konsep sosial. Setiap unit komunitas selalu memiliki elemen-elemen yang membentuk unit tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 22), beberapa elemen-elemen masyarakat dan keterkaitannya adalah :

1. Terdiri dari minimal dua orang.
2. Semua anggota memiliki rasa persatuan.
3. Interaksi yang terjalin dalam waktu yang lama akan membentuk individu baru yang saling berkomunikasi dan menetapkan aturan untuk hubungan antar anggota komunitas
4. Menjadi tatanan hidup bersama yang melahirkan budaya dan hubungan manusia dan keterkaitan satu sama lain sebagai warga negara.

Berbagai pola perilaku khas yang mengikat manusia, yang disebut masyarakat pada waktu itu. Pola-pola ini harus lestari dan berkelanjutan agar menjadi budaya.

Kebudayaan diyakini muncul dari proses pemikiran manusia dan menjadi nilai-nilai yang hidup. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan.

Soerjono Soekanto (2003) menyatakan bahwa ada ciri-ciri khas yang dimiliki masyarakat, yaitu :

1. Hidup Berkelompok.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ketidakmampuan ini mendorong orang untuk hidup berkelompok. Karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Cara berpikir ini menjadi pedoman bagi setiap individu untuk hidup bermasyarakat.

2. Melahirkan Kebudayaan.

Saat membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang mencoba mengintegrasikan pikiran dan pengalaman mereka untuk membentuk formula, budaya, yang dapat memandu tindakan mereka. Selain itu, budaya tersebut dipelihara dan diturunkan kepada generasi berikutnya.

3. Mengalami Perubahan

Latar belakang yang berbeda mengikat individu dengan masyarakat dan membuat orang mengalami perubahan. Perubahan ini dipandang sebagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Misalnya, jika orang menerima dampak perkembangan teknologi, mereka akan mengganti surat kertas dengan email

4. Berinteraksi.

Interaksi adalah dasar dari pembentukan sosial. Interaksi dilakukan untuk memuaskan keinginan individu dan kolektif. Melalui interaksi, orang membentuk unit sosial yang hidup.

5. Kepemimpinan.

Orang cenderung mengikuti aturan di bidangnya. Misalnya dalam ranah keluarga, kepala rumah tangga memiliki otoritas tertinggi untuk melindungi keluarga. Istri dan anak patuh pada ayah dan suaminya. Ini menunjukkan bahwa ada peran kepemimpinan dalam masyarakat yang membantu menyatukan individu.

6. Stratifikasi Sosial.

Kelas sosial mengelompokkan orang menurut status dan perannya dalam masyarakat. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok menyebabkan terbelahnya masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Dalam kehidupan sosial, stratifikasi sosial didasarkan pada kasta sosial, usia, suku, pendidikan, dan beberapa aspek lain yang menyebabkan keragaman.

2.3.3. Masyarakat Nelayan.

2.3.3.1. Nelayan

Nelayan merupakan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya secara langsung bergantung pada pengolahan sumber daya laut. Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang hidup dari hasil laut dan tinggal di desa-desa pesisir atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002).

Nelayan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang-orang yang pekerjaan utamanya adalah menangkap ikan (di laut).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mencari nafkah dari menangkap ikan, dan nelayan kecil adalah orang yang mencari nafkah dari menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Karakteristik nelayan dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang kegiatannya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau yang mencari nafkah dari menangkap ikan.
2. Secara kehidupan, nelayan adalah komunitas gotong royong. Gotong royong dan kebutuhan akan saling menolong sangat penting ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pengeluaran besar dan banyak masukan energi, seperti berlayar, membangun rumah, memecahkan ombak di sekitar desa, dan lain-lain.
3. Pekerjaan seorang nelayan adalah kerja keras, tetapi mereka umumnya memiliki keterampilan yang sederhana. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan, tetapi ini adalah profesi yang diwarisi dari orang tua mereka, bukan sebagai profesi yang dipelajari.

Menurut Mulyadi (2005:91), nelayan bukanlah suatu kesatuan tetapi terdiri dari kelompok-kelompok. Hal ini dapat dilihat dari kriteria berikut ini :

1. Kepemilikan Alat Tangkap.
 - a. Nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja pada alat tangkap orang lain atau biasa disebut buruh nelayan dan menerima upah dari nelayan juragan.
 - b. Nelayan juragan, adalah Nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri yang digunakan oleh orang lain. Hasil tangkapan biasanya milik nelayan juragan, dan memberi upah dari hasil tangkapan.
 - c. Nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam kegiatannya.
2. Status Nelayan.
 - a. nelayan penuh adalah nelayan yang hanya memiliki satu mata pencaharian dan itu adalah sebagai nelayan. Ia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain selain menjadi nelayan.
 - b. Nelayan Sambilan Utama adalah nelayan yang pekerjaan utamanya adalah menangkap ikan dan memiliki pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maka disebut nelayan.
 - c. Nelayan sambilan, Nelayan jenis ini biasanya memiliki pekerjaan lain sebagai sumber pendapatan. Itu hanya penghasilan sampingan selama bekerja sebagai nelayan.

3. Kepemilikan Sarana Penangkapan Ikan (berdasarkan UU N0. 65 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan).
 - a. Nelayan penggarap, adalah orang-orang yang melakukan usaha penangkapan ikan laut dengan fasilitas penangkapan ikan orang lain.
 - b. Pemilik adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kuasa atau kepemilikan atas kapal atau perahu dan alat penangkap ikan yang digunakan dalam perikanan yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemiliknya tidak melaut, ia disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik kapal berkecimpung dalam usaha penangkapan ikan di laut, ia juga seorang nelayan yang juga pemilik kapal.
4. Kelompok Kerja.
 - a. Nelayan Perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
 - b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama, Merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir tergabung dalam kelompok usaha bersama non badan hukum.
 - c. Nelayan Perusahaan, Merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan perjanjian kerja laut atau PKL dengan badan usaha perikanan.

5. Jenis Perairan (berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia).
 - a. Nelayan Laut, adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan lepas pantai, bisa laut dalam teritorial negara ataupun masuk dalam laut zona ekonomi eksklusif.
 - b. Nelayan Perairan Umum Pedalaman, adalah nelayan yang menangkap ikan di daerah pantai atau sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai suatu negara.
6. Mata Pencanharian.
 - a. Nelayan Subsisten, adalah nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
 - b. Nelayan Asli (*Native/Indigenous/Aboriginal Fishers*), adalah nelayan yang sedikit banyaknya memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
 - c. Nelayan komersial (*Commercial Fishers*) adalah nelayan yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau menjualnya di pasar domestik dan ekspor.
 - d. Nelayan Rekreasi (*Recreational/Sport Fishers*), adalah orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga.

7. Keterampilan Profesi.
 - a. Nelayan Formal, Keterampilan profesi menangkap ikan yang didapat dari belajar dan berlatih secara sistematis akademis dan bersertifikasi atau berijazah.
 - b. Nelayan Non formal, Keterampilan profesi menangkap ikan yang diturunkan atau dilatih dari orang tua atau generasi pendahulu secara non formal.
8. Mobilitas.
 - a. Nelayan Lokal, adalah nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan daerah setempat.
 - b. Nelayan Andon, adalah nelayan dengan kapal berukuran maksimal 30 Gross Tonage yang beroperasi menangkap ikan mengikuti ruaya kembara ikan di perairan otoritas teritorial dengan legalitas izin antar pemerintah daerah.
9. Teknologi.
 - a. Nelayan tradisional, adalah nelayan yang menggunakan teknik penangkapan ikan sederhana umumnya manual dengan tenaga manual. Kemampuan operasionalnya terbatas pada perairan pantai.
 - b. Nelayan modern, adalah nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang lebih canggih dari nelayan tradisional. Tingkat modernitas tidak hanya dari penggunaan mesin untuk menggerakkan perahu, tetapi juga dari ukuran mesin yang digunakan

dan ketersediaan alat tangkap yang digunakan. Perbedaan kecanggihan teknologi alat tangkap juga mempengaruhi kemampuan operasional.

10. Jenis Kapal.

- a. Nelayan Mikro, adalah nelayan yang menangkap ikan di kapal/perahu dari 0 (nol) GT (*gross tonnage*) sampai dengan 10 (10) GT.
- b. Nelayan kecil, adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu/perahu dari 11 (sebelas) GT (*gross tonnage*) sampai dengan 60 (60) GT.
- c. Nelayan menengah, adalah nelayan yang menangkap ikan di atas perahu/perahu dari 61 (61) GT sampai dengan 134 (134) GT.
- d. Nelayan besar, adalah nelayan yang menangkap ikan dengan perahu atau perahu berukuran 135 (135) GT atau lebih.

2.3.3.2. Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah mereka yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir, yaitu wilayah peralihan antara darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri dari kategori-kategori sosial yang membentuk unit-unit sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol budaya untuk merujuk pada perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya inilah yang membedakan masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir secara langsung atau tidak langsung bergantung pada

pengelolaan potensi sumber daya laut untuk kelangsungan hidup. Mereka adalah elemen kunci untuk membangun komunitas maritim Indonesia..

Seperti komunitas lainnya, masyarakat nelayan menghadapi permasalahan politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. masalah ini adalah :

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan mitra ekonomi masa depan;
2. Keterbatasan akses permodalan, teknologi dan pasar yang mempengaruhi dinamisme usaha;
3. Kelemahan dalam berfungsinya kelembagaan sosial ekonomi yang ada;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik;
5. Degradasi sumber daya lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, dan
6. Kurangnya kebijakan berorientasi kelautan yang kuat sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen dalam hal stratifikasi sosial ekonomi. Masyarakat pesisir dibentuk oleh berbagai kelompok sosial. Dilihat dari sumber daya ekonomi yang tersedia di wilayah pesisir dan aspek interaksi masyarakat, masyarakat pesisir dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan langsung sumber daya manusia seperti nelayan (primer), pembudidaya ikan pesisir dengan jaring apung dan kandang, pembudidaya rumput laut dan mutiara, pembudidaya budidaya.

2. Pengolah ikan atau hasil laut lainnya seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, terasi/kerupuk, tepung ikan/ikan, dan lain-lain;
3. Pendukung kegiatan penangkapan ikan pedagang, pemilik bengkel (mekanik dan tukang las), pengangkut, pembuat kapal, buruh.

Masyarakat pesisir memiliki ciri khas tersendiri, namun pada umumnya mereka berprofesi sebagai nelayan dengan teknik penangkapan ikan yang berbeda-beda. Mata pencaharian masyarakat pesisir didominasi oleh sektor sumber daya kelautan yaitu nelayan, pembudidaya tambak dan laut (Fauzi, 2000).

Secara sederhana, masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan masyarakat lain, seperti penghidupan, nilai, dan budaya yang homogen, sikap dan perilaku yang homogen, karakter keras, dan toleransi terhadap orang lain. Memiliki tingkat gairah seksual yang relatif tinggi, hubungan yang lebih intim antar anggota dan tingkat saling membantu yang lebih tinggi, dan cenderung meninggikan suara saat berbicara.

Ciri lainnya adalah sebagian besar nelayan pesisir adalah nelayan tradisional dan umumnya memiliki sifat yang sama. Artinya, mereka merasa tidak perlu pendidikan tinggi untuk mencari ikan di laut, sehingga tingkat pendidikan mereka masih rendah. Mengandalkan tenaga serta pengalaman mereka (Maria, et al., 2012). Karena tingkat pendidikan yang rendah, nelayan sulit berganti ke pekerjaan lain selain nelayan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi nelayan pesisir yaitu alam misalnya cuaca dan musim menangkap ikan, teknologi

penangkapan ikan yang masih sangat sederhana, adanya persaingan dengan nelayan modern atau korporasi perikanan, biaya operasional melaut yang tinggi diakibatkan mahalnnya sarana dan prasarana produksi, harga bahan bakar minyak buat melaut yang tinggi, ketergantungan nelayan tradisional kepada rentenir atau tengkulak ikan, tidak adanya alternatif lain sebagai mata pencaharian selain menjadi nelayan tradisional, pendapatan ekonomi nelayan tradisional yang tidak menentu mengakibatkan nelayan memiliki kehidupan yang layak (Ferdriansyah pada Indarti & Wardana, 2013).

Penyebab kemiskinan nelayan diakibatkan juga oleh faktor-faktor eksternal & internal. Kusnadi (2003) menyatakan bahwa kemiskinan nelayan diakibatkan faktor internal yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan modal untuk berusaha, keterbatasan teknologi penangkapan, interaksi kerja pemilik kapal dengan nelayan dan buruh nelayan yang kurang harmonis, ketergantungan kepada musim melaut dan gaya hidup yang konsumtif. Untuk faktor eksternal Kusnadi (2005) menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan nelayan dikarenakan kebijakan pembangunan perikanan yang masih belum berpihak dalam nelayan, sistem pemasaran hasil perikanan yang hanya menguntungkan pedagang perantara, permasalahan rusaknya ekosistem laut karena pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen dan terbatasnya peluang kerja disektor non perikanan (*off fishing*) pada desa-desa nelayan. Kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib pada hasil laut, yang membuat nelayan semakin sulit untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Ramdayanti, E., Argenti, G., dan Marsingga, P dengan judul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. Terjadi penguatan. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah daerah terdekat sebagai pengendali, dinamisator, fasilitator, dan pendorong dalam melakukan jaringan penangkapan ikan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan strategi ilustratif dengan metodologi subjektif. Informasi dibedah melalui strategi wawancara dan persepsi langsung ke lapangan. Konsekuensi dari pemeriksaan ini adalah tugas instansi pemancing dapat dikatakan besar dengan adanya pelatihan, persiapan, program perlindungan dan pemberian jabatan dan kerangka kerja kepada pemancing di kota Ciparagejaya.
2. Windasai, W., Said, M.M.U., dan Hayat, H, dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep, 2021. legislatif dalam melibatkan jaringan penangkapan ikan, serta unsur-unsur yang membantu dan mempengaruhinya Eksplorasi ini menggunakan teknik subjektif dengan cara yang ekspresif untuk menghadapi jenis penelitian investigasi kontekstual. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Akibat dari penelitian ini terkait dengan tugas pemerintah daerah dalam melibatkan jaringan penangkapan ikan, khususnya menyusun program-program penguatan jaringan penangkapan ikan seperti memperluas

SDM, membuat kantor dan kerangka kerja serta mendirikan yayasan pemancing, namun secara lokal masih terdapat beberapa kendala. , misalnya tidak adanya SDM di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, keharusan rencana keuangan, tidak adanya inovasi dan transportasi yang memuaskan. Hal ini membuat penguatan jaringan penangkapan ikan menjadi tidak bisa dibilang ideal.

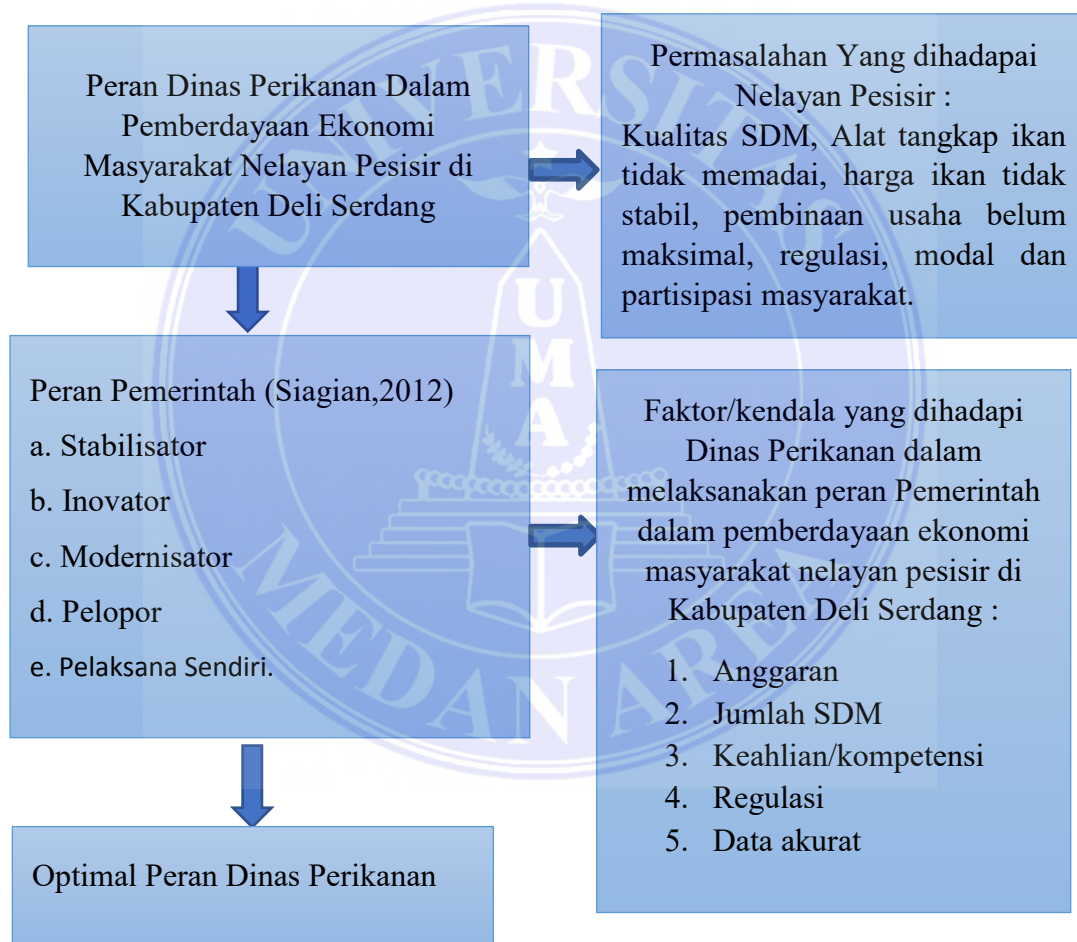
3. Hari Suprajitno, dengan Judul Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Pesisir Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun 2021. Pemancing Adat di Tepian Popoh Kabupaten Tulungagung tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemelaratan. Penelitian ini bermaksud untuk membedakan dan membedah pendekatan penguatan pemancing adat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif dan ilustratif. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga periode penguatan yang signifikan, khususnya tahap permulaan, partisipatif, dan emansipatoris. Namun, ketiga tahap tersebut belum menunjukkan hasil yang ideal.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Romi Satria Wahono (2020: 54) Struktur penalaran adalah bagan yang membingkai kemajuan yang koheren dari sebuah ulasan. Sistem ini dibuat berdasarkan soal-soal ujian, dan membahas beberapa ide dan hubungan antara ide-ide dalam proposal.

Adapun kerangka pikir pada penelitian Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian



Sumber : Hasil olahan peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang diawali dari adanya minat seseorang dalam memahami suatu fenomena yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep. Untuk mencapai tujuan ilmiah dalam sebuah penelitian dibutuhkan satu metode yang tepat, karena metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sugiyono (2018:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Mawar No.12 Lubuk Pakam. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 s/d Maret 2022

3.3. Subjek / informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif subyek penelitian disebut dengan istilah informan. Subjek penelitian memiliki peran sangat penting dalam sebuah penelitian, karena subjek penelitian adalah orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang dilakukan. Moleong (2006;132) menyatakan bahwa Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berjumlah 7 orang, yaitu:

1. Informan kunci : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan Utama : - Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- Analis Kebijakan.
3. Informan Tambahan : - 4 (Empat) orang nelayan dari kecamatan pesisir.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta- fakta berupa angka, simbol, atau tulisan, yang diperoleh dengan mengamati suatu objek. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sugiyono (2018:456) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dimana data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dimana tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder tidak dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objek yang diteliti, melainkan data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain. Sugiyono (2018:456) menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul penelitian mengenai Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam suatu penelitian. Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas

yang tinggi. Bungin (2007) menyatakan bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan Teknik analisis data adalah :

1. **Observasi** yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti. Teknik observasi digunakan tidak hanya untuk meneliti data dari sumber data berupa peristiwa, tindakan, tempat atau lokasi, tetapi juga objek dan gambar yang direkam. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2006: 75). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir.
2. **Wawancara mendalam** (*depth Interview*) yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006:68). Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha

menggali sebanyak mungkin tentang Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir.

3. **Dokumentasi.** Sugiyono (2018:476) menyatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2018:482).

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. **Reduksi Data** (*Data Reduction*)

Sugiyono (2018:247-249) menyatakan reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan yang akan dicapai yang telah ditentukan sebelumnya akan menjadi panduan dalam mereduksi data. Kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dalam proses berfikir kritis sangat diperlukan dalam proses reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Pada penelitian kualitatif biasanya penyajian data berbentuk uraian singkat, bagan, tabel, dan lainnya (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018: 252) Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dalam analisis data ini terbagi atas kesimpulan sementara dan kesimpulan kredibel. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan dengan bukti-bukti valid dan

konsisten yang dikumpulkan peneliti dilapangan disebut kesimpulan yang kredibel.

3.7. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran menurut Soekanto (2001:242) adalah proses dinamis status atau kedudukan, menyiratkan kinerja peran ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran itu. Perbedaan posisi dan peran saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain.
- b. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:111) adalah upaya untuk menata masyarakat bersamaan dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
- c. Perekonomian Rakyat menurut Sumodiningrat (2013:42) perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri

3.7.2 Definisi Operasional

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dijelaskan oleh Siagian (2012: 142-150) bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditekankan adalah stabilisator, inovator, modernisator, pionir, dan pelaku sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Rincian peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah untuk membawa perubahan yang tidak mengganggu yang dapat menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam keutuhan nasional dan kesatuan dan persatuan bangsa. Peran ini dapat dipenuhi dengan beberapa cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tapi efektif, pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap yang berkesinambungan.
- b. Inovator, sebagai inovator pemerintah harus menjadi sumber hal-hal baru. Oleh karena itu, kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat menjalankan perannya secara efektif memerlukan tingkat legitimasi yang tinggi. Misalnya, pemerintah yang "memenangkan" perebutan kekuasaan atau memenangkan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil dengan sedikit legitimasi akan kesulitan untuk membawa inovasinya ke publik. Tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam penerapan inovasi adalah penerapan yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, semua bangsa ingin melalui pembangunan agar menjadi bangsa yang kuat, merdeka, dan diperlakukan sama oleh bangsa lain.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam pengelolaan, kemampuan mengolah sumber daya alam yang bernilai tambah tinggi, sistem pendidikan nasional yang kredibel yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kehidupan politik dan demokrasi yang kuat, memiliki landasan dan visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, sebagai pelopor pemerintah harus menjadi contoh dan panutan bagi seluruh masyarakat. pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja produktif, penegakan keadilan dan disiplin, kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan dalam pengorbanan untuk bangsa.
- e. Pelaksana sendiri, pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bukan hanya pemerintah saja. Namun atas beberapa pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, kurangnya minat masyarakat dan oleh konstitusi adalah merupakan tugas Negara, maka terdapat beberapa kegiatan tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta dan harus dilakukan oleh pemerintah sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan telah melaksanakan peran sebagai stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaku sendiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang namun belum memberikan hasil yang optimal.
2. Kendala - kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang adalah : Rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perikanan, Kemampuan manajerial/pengelolaan kelompok yang rendah, Kesadaran dan niat berusaha masih sangat rendah. Keterbatasan jumlah, keahlian dan kompetensi aparatur di Dinas Perikanan dalam pembinaan dan pendampingan. Kemampuan anggaran Dinas Perikanan masih sangat kurang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan nelayan serta Regulasi dan kebijakan yang membatasi ruang gerak Dinas Perikanan dalam menjalankan perannya. Masih kurangnya kerjasama lintas sektoral antar instansi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan perlu memperbanyak sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya keahlian dan kemampuan yang diperoleh dari pelatihan keterampilan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kesempatan berusaha.
2. Berdasarkan beban kerja dan luasnya wilayah kerja diharapkan adanya penambahan / perekrutan pegawai yang berlatar belakang pendidikan perikanan dan kelautan, serta lebih meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan teknis agar kualitas pelayanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir lebih maksimal.
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hendaknya meningkatkan jumlah anggaran Dinas Perikanan agar upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir dapat lebih maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas atau Instansi lain dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2009. *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Penerbit, CV. Alfabeta Bandung.
- Arsyad, Lincolin. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2021*. Lubuk Pakam :CV Rilis Grafika
- Budiharsono, Sugeng. 2009. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung
- Clark, J.R. 1996. *Coastal Zone Management Handbook*. Boca Raton Florida, USA: Lewis Publishers.
- Dahl, Robert. 1994. *Analisa Politik Modern*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Davey, P. (2011). *At a Glance Medicine*. Jakarta: Erlangga
- Jim Ife, 1997. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. Longman : Melbourne
- Anggraini, Jum. 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kartasasmita, Ginanjar, 2012, *Pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Jakarta: Bappenas
- Ketchum, 1972. *GESAMP 2001. Reports and Studies. A Sea of Trouble. Coordination Office of the Global Programme of Action for The Protection of The Marine Environment from Land and Based Activities (UNEP)*. The Hague Division of Environmental Convention (UNEP)-Nairobi
- Kodoatie, Robert dan Sjarief, Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Jogjakarta: CV. Andi Offset
- Kusnadi, (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Kusnadi. 2005. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- .Milles, Matthew B. 1973. *Inovasi dalam Pendidikan*. New York: Pers Perguruan Tinggi Guru Universitas Columbia.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,

- Munandar, Utah. 2006. *Kreativitas dan Bakat, Strategi Mewujudkan Potensi dan Bakat Kreatif*. Jakarta: Gramedia
- Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Nurmansyah, Gungsu, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Sarwono, Sarlito W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sastrawidjaya, dkk. 2002. *Nelayan Nusantara*. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono . (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pers
- Sudarmanto, Eko, dkk., 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumodiningrat, Gunawan. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press

Widjaja, HAW., 2013. *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persad
 Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2010, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elek Media Komputindo
 Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Kencana,

2. Jurnal, Majalah dan Tesis

- Fauzi, S. 2000. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir. Materi pada Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan. Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology.
- Indarti, I. & Wardana, D. S. (2013). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 75-88.
- Jones, V. and Westmacott, S.E. (1993). Management arrangements for the development and implementation of coastal zone management programmes. World Coast Conference 1993. International Conference on Coastal Zone Management. The Netherlands: Coastal Zone Management Centre.
- Kristiyanti, M. (2016, August). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*. Stikubank University.
- Widasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793-804.
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (20.). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194-201.
- Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 103–110
- Vindyandika, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rineka Cipta
 Rohmanu Azhim, Afifuddin dan Hayat, 2019. *Pemberdayaan Suatu Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Penanggulangan Bencana*. *Jurnal Respon Publik*. Vol.13, No.6

3. Internet

KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Availableat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenangdiakses_pada_27_Januari_2022

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU NO. 65 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

Lampiran I
Kuesioner Penelitian

1. Peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang
 - a. Stabilisator
Bagaimana stabilisator peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - b. Inovator
Bagaimana inovator peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - c. Modernisator
Bagaimana modernisator peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - d. Pelopor
Bagaimana pelopor peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - e. Pelaksana sendiri
Bagaimana pelaksana sendiri peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?

LEMBAR JAWABAN

Nama :
Jabatan :
Instansi :

2. Faktor kendala Dinas Perikanan dalam pemberdaayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang
- a. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala stabilisator peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala innovator peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - c. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala peran modernisator Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - d. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelapor peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?
 - e. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelaksana sendiri peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang?

LEMBAR JAWABAN

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Lampiran II
Foto Wawancara

	
<p>Wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap</p>	<p>Wawancara Analis Kebijakan</p>
	
<p>Bapak Muhammad Ali Pantai Labu</p>	<p>Bapak Sulaiman Percut Sei Tuan</p>
	
<p>Bapak Hasanuddin Chan Labuha Deli</p>	<p>Bapak Ramadhan Hamparan Perak</p>

Lampiran III Kegiatan Pemberdayaan Nelayan

	
Pelatihan pembuatan jaring	Bantuan kapal nelayan
	
Bantuak sampan seruai	Bantuan jaring dan sampan
	
Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Pelatihan pengasapan lele